

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi II*, terj. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 237.

al-Din an-Nabhani, Taqi. *Membangun Sisten Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risliah Gusti, 1996.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010.

al-Shawkani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad dan Nayl al-Awtar, jilid V. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt, hal 311.

Badan Pertanahan Nasional, *Pengarahan Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah pada Rapat Konsultasi Teknis Para Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Seluruh Indonesia*, (Jakarta: 15 Juli 2003), hal. 13

Dawud, Sunan. Abu Hadis riwayat Abu Dawud al-Sijistani, hadis no. 3075, CD. al-Maktabah al-Shamilah.

Dewi Ginting, Elvira. *Analisis Hukum mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*. Medan: USU Press, 2010

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp, 2014

Mannan, Abdul. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.

Manullang, Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, ed. Pertama, cet. 1, Jakarta:PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016.

Mustafa, Bachsa. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1979.

Nasution, Lutfi I. *Konflik Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan Agraria*. Bandung: Yayasan Akatiga, 2002.

Nurnaningsih, Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

- Prakoso, Djoko dan Budiman Adi Purwanto. *Efisiensi Prona sebagai Mekanisme Fungsi Prona Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Purbopranoto, Kuntjoro. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni Bandung, 1985.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 12*. Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Saleh, K. Wantjik. *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, cet. 5, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sihombing, B.F. *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah : Dalam analisa pembatalan pendaftaran hak atas tanah*. Jakarta : Cipta Jaya. 2006.
- \_\_\_\_\_. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Sinar Grafika. Jakarta 2011
- Syarif, Elsa. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, cet.2. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Tauhid, Mochammad. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press, 2009.
- Tim Thalishah. *ensiklopedi Hukum Islam : jilid I*. Bogor: PT. karisma Ilmu, 2007.
- Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali press. 2016
- Zuhroni, *Dasar Dan Sumber Syariat Islam*. Jakarta: Bagian Agama Islam Universitas YARSI, 2010.

## **Undang-undang**

- Indonesia. *Undang-undang Pokok Agraria*. UU No 5 tahun 1960.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*. PP No. 24 Tahun 1997.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Agraria tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan*. Permenag No. 9 tahun 1999.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 51 Tahun 2009

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah*. PermenAgraria Nomor : 3 Tahun 1999

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor. 48/G/2012/PTUN-JKT

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor. 208/B/2012/PT.TUN.JKT

Putusan Mahkamah Agung RI 233K/TUN/2013

Putusan Mahkamah Agung RI 13 PK/TUN/2015

### **Jurnal**

Atardi, Ibnu. *Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Oktober 2006, hal.67

Putra, Fani Martiawan Kumara. “Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan”. *Jurnal Presfektif*. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Vol XX, Mei 2015, hal. 104

Keputusan menurut Wet AROB (Belanda) dalam philipus m. hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 132

### **Artikel**

Murad, Rusmadi. *Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan Penanganan Kasus Tanah, Makalah disajikan pada Seminar Nasional “Sengketa Tanah, Permasalahan dan Penyelesaiannya”*, Jakarta, 20 Agustus 2003.

Nugraha, Safri. *Hukum Administrasi Negara*, Perpustakaan nasional katalog dalam terbitan, Jakarta. 2005, Hal .110

## **Tesis dan Skripsi**

Emaculata, Maria “Tinjauan Yuridis Putusan No. 10/G/Tun/2002/Ptun.Smg (Studi Kasus Sertifikat Ganda/ “Overlapping” Di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang)” tesis magister kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006.

## **Internet**

Anugrahni,A. Memahami Kepastian Hukum (dalam) Hukum” <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05memahami-kepastian-dalam-hukum>, diakses pada Tanggal 22 Febuari 2018

Rahmajaba, Naziatul. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Hak Milik Atas Tanah, [www.digilib.umm.ac.id/gdl](http://www.digilib.umm.ac.id/gdl). Diakses 20 Maret 2018

Hasanudin, Moh. Faishol. Sudut Pandang Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria. Hal. 4. [www.ptaambon.net](http://www.ptaambon.net) . Diakses Pada 22 Maret 2018